



ANTISIPASI KONTRAKSI EKONOMI

Perlu Terobosan untuk Selamatkan UMKM

YOGYA (KR) - Pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional hingga daerah yang mengalami kontraksi pada kuartal kedua harus dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan. Terutama perlunya terobosan untuk menyelamatkan UMKM maupun industri yang menjadi penggerak ekonomi di Kota Yogya.

"Dari total anggaran Pemkot untuk penanganan Covid-19 sejumlah Rp 174 miliar, banyak dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi sejumlah Rp 94 miliar. Sebagian besar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kewilayahan dan dukungan UMKM serta industri. Tapi hingga saat ini belum ada progres terkait rencana dan realisasi anggaran penanganan ekonomi tersebut," ungkap anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, Rabu (12/8).

Menurutnya, pada saat pemaparan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), target sasaran pembangunan tahun 2020 mengalami perubahan. Di antaranya pertumbuhan

ekonomi dari 5,2 persen menjadi minus 2,20 persen. Kemudian tingkat pengangguran, angka kemiskinan serta gini rasio juga mengalami penambahan.

Melihat adanya perubahan target tersebut, Pemkot perlu melakukan berbagai terobosan untuk menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Saat ini usaha yang sudah ada dinilai masih sangat minim. "Pemkot mestinya memiliki upaya terobosan yang lebih besar untuk menahan anjloknya perekonomian, mengingat anggaran telah disediakan," imbuhnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi minus 5,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara di DIY ter-

catat minus 6,74 persen. Jika pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi DIY khususnya di Kota Yogya kembali minus, kondisi lebih buruk bisa terjadi.

Oleh karena itu, Nurcahyo mendesak pemerintah mengerahkan segala potensi untuk menyelamatkan UMKM jika ingin meredam resesi ekonomi. Kalaupun akhirnya terjadi resesi, ia yakin kondisi buruk tidak akan berkepanjangan jika UMKM bangkit dan usahanya dapat kembali berjalan. "Pemerintah harus *all out* membantu UMKM. Jika dianggap tak memenuhi persyaratan bank, bantu dan bimbing sehingga mereka layak mendapat bantuan modal. Jangan biarkan UMKM terus bertumbangan karena kesulitan mengakses modal kerja," katanya.

Selain itu dirinya juga memberikan rekomendasi agar Pemkot melakukan pemetaan kondisi UMKM, mempunyai grand desain penyelamatan UMKM serta verifikasi kembali data penerima bantuan sosial. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005